

**FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2012-2015**



SKRIPSI

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

**FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2012-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Oleh:
HOLIFAH
NIM: 13810069

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ketimpangan suatu daerah merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang efektif merupakan harapan setiap daerah di Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang berbeda antar daerah, jumlah penduduk yang semakin bertambah, dan jumlah industri yang tidak merata di beberapa daerah dapat menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2012-2015. Ada empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan industri. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri dari *time series* selama lima tahun yaitu tahun 2012-2015 dan *crossection* 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. sementara itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode REM (*Random Effect Model*).

Adapun hasil penelitian ini antara lain: *pertama*, ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari 0,30 pada tahun 2012 dan 0,33 pada tahun 2015, angka tersebut dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang; *kedua*, pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan; *ketiga*, jumlah penduduk dan industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan; *keempat*, variabel-variabel tersebut memiliki R^2 sebesar 0.295455. Angka ini manunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan industri dapat menjelaskan 29,54 persen variabel ketimpangan pendapatan antar daerah. Sisanya yaitu 70,46 persen yang berarti ketimpangan pendapatan antar daerah dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini; dan *kelima*, dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat diminimalisir dengan kebijakan pemerintah yang dapat memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berbasis pada kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, Industri dan Ketimpangan Pendapatan

ABSTRACT

Inequality of a region is one of the problems of economic development. Effective economic development is the hope of every region in Indonesia. Given the different economic growth and human development index (HDI) between regions, the growing number of people, and the uneven amount of industry in some areas can cause inequality and income disparities between regions.

This study aims to analyze the factors that affect income inequality between districts / cities in West Java Province period of 2012-2015. There are four independent variables used in this research are economic growth, HDI, population and industry. Methodologically, this study uses secondary data in the form of panel data consisting of time series for five years ie 2012-2015 and crossection 27 regencies / cities in West Java Province. Meanwhile, data analysis used in this research is REM (Random Effect Model) method.

West Java Province in 2012-2015 has increased from 0.30 in 2012 and 0.33 in 2015, the figure can be categorized in moderate inequality; Second, economic growth and HDI have no significant effect on inequality; Third, the population and industry have a significant effect on inequality; Fourth, those variables have R2 of 0.295455. This figure indicates that the variable of economic growth, HDI, population and industry can explain 29.54 percent variable income inequality among regions. The rest is 70.46 percent, which means the income gap between regions is explained by the variables not included in this study; And fifth, in the perspective of Islamic economics, income inequality that occurs in districts / cities in West Java Province can be minimized with government policies that can ensure sustainable economic development and based on the equitable welfare in society (الرعاية منوط بالمصلحة).

Keywords: Economic Growth, HDI, Population, Industry and Inequality of Revenue

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Holifah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Holifah
NIM : 13810069
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2015

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Maret 2017
Pembimbing,

Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-2061/Un.02/DEB/PP.05.3/05/2017

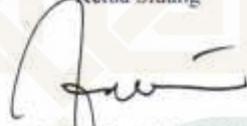
Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2015

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Holifah
NIM : 13810069
Telah diujikan pada : Jumat, 20 April 2017
Nilai : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang



Ibi Saibi, S.H.I., M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

Pengaji I

Dr. H. Slamet Haryono, M.Si., Akt.
NIP. 19761231 200003 1 005

Pengaji II

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.
NIP. 19820219 201503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 18 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
DEKAN


Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 196705 18 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Holifah
NIM : 13810069
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor-faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012-2015**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 31 Maret 2017

Yang menyatakan,



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holifah
NIM : 13810069
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Faktor-faktor Ketimpangan pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 31 Maret 2017

Yang menyatakan,



(Holifah)

HALAMAN MOTTO

Hidup Adalah Keteguhan Tekad, Bukan Apa Yang Diberikan Oleh Kehidupan
Tapi Apa Yang Dapat Kita Berikan Untuk Kehidupan, Bukan Apa Kesulitan
Kita Tapi Bagaimana Kita Mengatasi Kesulitan Kita.

Lewis L. Dunnington



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk
Ayahanda, ibunda, adik dan kedua kakakku tercinta
serta almamaterku Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga peneliti skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ekonomi Syari'ah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak baik berupa do'a, pengorbanan, maupun motivasi yang diberikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda M. Maksudi dan Ibunda Rumiyah, kakanda Mahiyah dan Humaedi serta adikku Hurosin yang selalu memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi PhD. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
4. Ibu Sunaryati, S.E., M.Si. selaku Kaprodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Ibi Satibi, S.H.I., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
6. Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah 2013 yang telah banyak membantu penulis, Edi Haryoto, Misbahul Munir, Luthfiyah.
7. Teman baikku (Lastoni Aji, Luthfiyah, Rizki Dwi Afifah, Iis Wahyu Hidayati, Yuanita Mega Sundari dan Rizki Dinawati) yang telah memotivasi penulis.

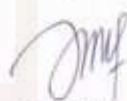
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca umumnya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Maret 2017

Penyusun,



Holifah
NIM. 13810069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
B ’		b	be
T ’		t	te
,			es (dengan titik di atas)
J m		j	je
,			ha (dengan titik di bawah)
Kh ’		kh	ka dan ha
D l		d	de
l			zet (dengan titik di atas)
R ’		r	er
Z i		z	zet
S n		s	es
Sy n		sy	es dan ye
d			es (dengan titik di bawah)
d			de (dengan titik di bawah)

	,		te (dengan titik di bawah)
	,		zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	F ‘	f	ef
	Q f	q	qi
	K f	k	ka
	L m	l	el
	M m	m	em
	N n	n	en
	W wu	w	w
	H ‘	h	ha
	Hamzah	‘	apostrof
	Y ‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Ditulis	Ditulis	Muta ‘addidah ‘iddah

C. *Tā’ marb ah*

Semua *tā’ marb ah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

الأولياء	Ditulis ditulis ditulis	<i>ikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyā'</i>
----------	-------------------------------	------------------------------------------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fat ah	ditulis	A
---	Kasrah	ditulis	i
---	ammah	ditulis	u

يَدْهُب	Fat ah Kasrah ammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa'ala</i> <i>ukira</i> <i>ya habu</i>
---------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------

E. Vokal Panjang

1. fat ah + alif  2. fat ah + y ' mati  3. Kasrah + y ' mati  4. ammah + w wu mati	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i> ā <i>tansā</i> ī <i>karīm</i> ū <i>furū</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

F. Vokal Rangkap

1. fat ah + y ' mati  2. fat ah + w wu mati	Ditulis ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i> au
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

	ditulis	<i>qaul</i>
--	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	-----------------------------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
--------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهـل	Ditulis Ditulis	<i>awi al-fur</i> <i>ahl as-sunnah</i>
------	--------------------	-------------------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SEKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SEKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan	13
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
2.3 Teori Indeks Pembangunan Manusia	17
2.4 Teori Jumlah Penduduk.....	19
2.5 Teori Industri.....	22
2.6 Kesenjangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah	24
2.7 Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.	27
2.8 Kependudukan dalam Perspektif Syari'ah	28
2.9 Telaah Pustaka.....	29
2.10 Hipotesis	
2.10.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan pendapatan	37
2.10.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Ketimpangan Pendapatan	37
2.10.3 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan	39
2.10.4 Hubungan Industri dengan ketimpangan Pendapatan.....	40
2.11 Kerangka pemikiran	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	43
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.3 Definisi Operasional	44
3.3.1 Ketimpangan Pendapatan.....	45
3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	46
3.3.3 Indeks pembangunan Manusia	47

3.3.4 Jumlah Penduduk	48
3.3.5 Industri	48
3.4 Metode Analisis	49
3.4.1 Pendekatan <i>Fixed Effects Model</i> (FEM)	51
3.4.2 Pendekatan <i>Random Effect Model</i> (REM)	51
3.4.3 Pendekatan <i>Common Effect</i>	52
3.5 Teknik Analisis data	52
3.5.1 Uji Spesifikasi Model.....	52
3.5.2 Pengujian Hipotesis.....	53
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	56
4.1.1 Keadaan Geografis	56
4.1.2 Gambaran Perekonomian	58
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	59
4.1.4 Industri	60
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.3 Hasil Analisis.....	65
4.3.1 Analisis ketimpangan Pendapatan.....	65
4.4 Analisis Regresi Data panel	68
4.4.1 Uji Spesifikasi Model	68
4.4.2 Hasil Estimasi <i>Random Effect</i>	69
4.5 Pengujian Hipotesis	71
4.5.1 Uji F.....	71
4.5.2 Uji T	72
4.5.3 Koefisien Determinasi.....	74
4.6 Pembahasan	74
4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan	75
4.6.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan	76
4.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan.....	77
4.6.4 Pengaruh Industri Terhadap Ketimpangan.....	78
4.6.5 Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Penelitian	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Implikasi	86
5.3 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa ..	5
Tabel 1.2 Distribusi Provinsi Jawa Barat Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	7
Tabel 1.3 Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	56
Tabel 4.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Jawa Barat.....	57
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat	58
Tabel 4.4 Industri Besar Sedang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ..	60
Tabel 4.5 Data Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.6 Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Likelihood</i>	65
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Hausman Test</i>	67
Tabel 4.9 Estimasi <i>Random Effect Model</i>	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Luar Jawa Terhadap PDRB 34 Provinsi	3
Gambar 1.2 Nilai PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 (triliun rupiah).....	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan. Tujuan adanya pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2015: 11).

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Selain itu ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan demografi yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografi yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografi berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografi yang baik cenderung meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Syafrizal, 2012: 120).

Dari teori diatas dapat diambil beberapa faktor-faktor yang diduga bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2015 yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan industri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Hidayat, 2014: 2). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan.¹

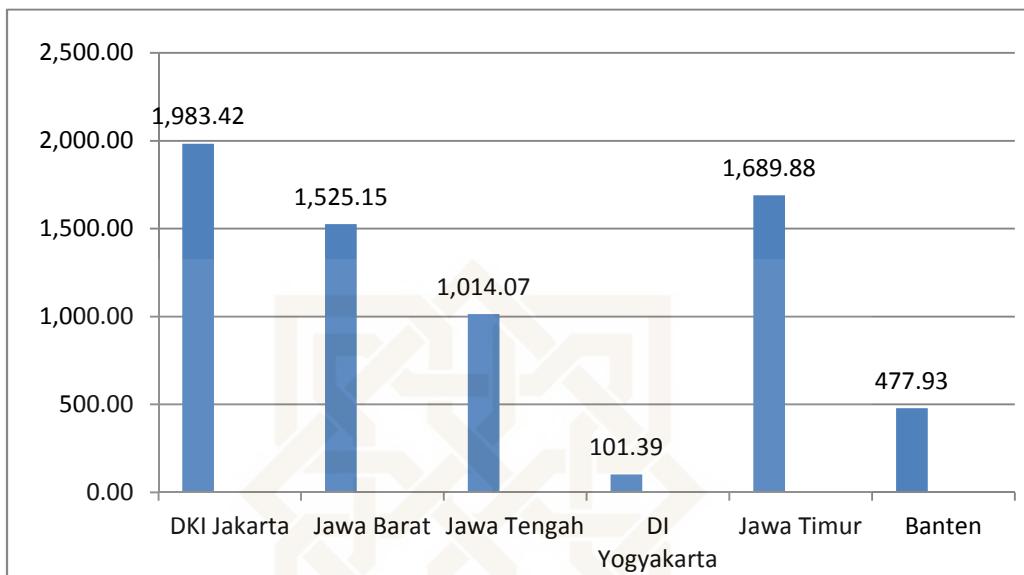
Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi atau peranan menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan nilai tambah. Pada tahun 2015 Pulau Jawa masih dominan dengan meyumbang 58,29 persen bagi perekonomian nasional, sedangkan sisanya dari luar Jawa menyumbang sebesar 41,71 persen.

¹http://www.pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/definisi_dan_metode_indikatormakro.html. Diakses 27 April 2017



Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurut BRS Nasional, 2016, apabila diurutkan dari nilai-nilai PDRB yang ada di Pulau Jawa terdapat 3 provinsi dengan nilai terbesar yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 2015 PDRB DKI Jakarta mencapai 1.983,42 triliun rupiah, Jawa Timur mencapai 1.689,88 triliun rupiah dan Jawa Barat mencapai 1.525,15 triliun rupiah. Dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa, DI Yogyakarta adalah provinsi dengan pembentukan nilai tambah bruto terkecil. PDRB Jawa Tengah mencapai 1.01,39 triliun rupiah. PDRB Banten mencapai 477,93 triliun rupiah. Dan DIY mencapai 1.01,39 triliun rupiah (Statistik daerah Provinsi Jawa Barat, 2016: 70).

Gambar 1.2
Nilai PDRB Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 (triliun rupiah)



Sumber: BRS Nasional, 2016

Tujuan pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Akan tetapi tujuan pembangunan harus memperhatikan proses pemerataan atau distribusi nilai tambah tertentu dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kesenjangan atau ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro, 2015: 263).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Menurut Todaro (2011: 57), menjelaskan IPM atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian

pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dengan kata lain IPM yang baik mampu mengurangi ketimpangan pada masyarakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) di Pulau Jawa terdapat perbedaan IPM antar Provinsi. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan rata-rata IPM sebesar 77,46% diikuti Provinsi DI Yogyakarta sebesar 76,14%, kemudian Provinsi Banten sebesar 68,81%, Provinsi Jawa Barat sebesar 67,44%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 67,35% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 66,77%.

**Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2012-2015 (%)**

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	
1	DKI JAKARTA	77.53	78.08	78.39	78.99	78.25
2	JAWA BARAT	67.32	68.25	68.80	69.5	68.42
3	JAWA TENGAH	67.21	68.02	68.78	69.49	68.38
4	DI YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59	76.75
5	JAWA TIMUR	66.74	67.55	68.14	68.95	67.85
6	BANTEN	68.92	69.47	69.89	70.27	69.64
	PULAU JAWA	70.65	71.30	71.80	72.47	71.55
	INDONESIA	67.70	68.31	68.90	69.55	68.62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling

mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan kualitas yang baik akan memberikan suatu keuntungan, namun jika sebaliknya maka akan menjadi masalah besar. Menurut Sukirno (2016: 105), menjelaskan bahwa Perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat suatu wilayah/daerah untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan jurang yang sudah ada diantara beberapa golongan masyarakat menjadi bertambah lebar. Dari teori tersebut dapat dikatakan dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat berpotensi meningkatkan angka ketimpangan suatu wilayah/daerah.

Jawa Barat merupakan provinsi terpadat penduduknya di Indonesia. Pada tahun 2015 penduduk Jawa barat mencapai 46.709.569 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Tiga wilayah dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor sebesar 5.459.668 orang (11,69%), kabupaten Bandung 3.534.114 orang (7,57%) dan Kabupaten Bekasi 3.246.013 orang (6,95%). Sebaran penduduk di Jawa Barat belum merata, ini terlihat dari hampir setengah penduduk Jawa Barat tinggal di wilayah ibu kota provinsi (Bandung Raya) sebesar 17,63% dan wilayah penyangga ibu kota (Jakarta) sebesar 31,20% (Statistik daerah provinsi Jawa Barat: 2016: 10).

Dari teori syafrizal yang disebutkan di atas dengan adanya faktor demografi yang baik maka akan meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Hal ini berarti akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Maka dari itu, sangat berkaitan dengan industri. Hal ini didukung juga dengan teori Adelman & Morris (1973) dalam bukunya Lincoln Arsyad (2010: 283-284), yang mengemukakan bahwa salah satu faktor ketimpangan adalah industri. Industri merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam struktur ekonomi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2014-2015 (Persen/%)

Kategori	Uraian	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,74	8,71
2	Pertambangan dan Penggalian	2,43	1,70
3	Industri Pengolahan	43,60	43,03
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,79	0,73
5	Pengadaan Air	0,07	0,07
6	Konstruksi	8,12	8,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,25	15,21
8	Transportasi dan Pergudangan	4,80	5,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum`	2,43	2,50
10	Informasi dan Komunikasi	2,46	2,60
11	Jasa keuangan	2,56	2,61
12	Real Estate	1,04	1,01
13	Jasa Perusahaan	0,39	0,40
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,41
15	Jasa pendidikan	2,55	2,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,70
17	Jasa lainnya	1,82	1,85
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100

Sumber: Jawa Barat dalam angka, 2016

Berdasarkan tabel 1.3, menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan pada tahun 2015 sebesar 43,03% atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 43,60%. Dari semua sektor ekonomi yang ada sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Jawa Barat. Hal ini juga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi sektor yang strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua wilayah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlaksana jika pertumbuhan ekonomi disertai dengan kecilnya kesenjangan ekonomi. Meski demikian, di Provinsi Jawa Barat sendiri masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi. Angka ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 33,62% sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 30,45. Hal ini disebabkan karena kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang relatif berbeda. Laju kesenjangan dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4
Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015 (persen)

2012	30.45
2013	31.60
2014	32.68
2015	33.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016 (diolah)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya menganalisis keempat variabel independen dalam ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan industri. Tahun 2012-2015 dipilih sebagai interval obyek penelitian. Pertama, Dalam

empat tahun terakhir sejak tahun 2012 ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Angka ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 33,62% sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 30,45%. *Kedua*, berdasarkan publikasi resmi BPS, pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat tahun 2015 mencapai 1.525,15 triliun rupiah. Provinsi Jawa Barat menempati PDRB ke dua dari 6 provinsi yang ada di pulau Jawa. *Ketiga*, berdasarkan data BPS, Indeks pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat menduduki peringkat ketiga diantara 6 provinsi di Pulau Jawa setelah provinsi DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut, dengan mengambil judul penelitian “**FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2015**”.

1.2 Rumusan masalah

Pertumbuhan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pendapatan pada masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Padahal Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi yang cukup baik bagi jalur industri. Namun, ketimpangan yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan persebaran perekonomian yang tidak merata, hal ini dapat dilihat dari hasil indeks williamson yang terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?
2. Bagaimana pengaruh variabel indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?
3. Bagaimana pengaruh variabel jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?
4. Bagaimana pengaruh variabel industri terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Barat periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan variabel dependen ketimpangan pendapatan dan variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan jumlah industri menengah sedang. Alat analisis yang digunakan untuk menguji variabel pada penelitian ini yaitu regresi data panel dengan aplikasi Eviews 8.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh besarnya tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- b. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di suatu wilayah/provinsi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini direncanakan terdiri dari lima bab yaitu Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, perumusan masalah sebagai inti permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini , batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut terdiri dari enam teori yaitu ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk, industri, dan ekonomi islam. Kemudian terdapat telaah pustaka untuk mengetahui penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran supaya mengetahui batasan dalam penelitian.

Bab III merupakan metode Penelitian, pada bab ini dipaparkan tentang sampel dan populasi, jenis dan pengumpulan data, definisi operasional, metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan Hasil dan Pembahasan, pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, gambaran perekonomian, analisis statistik

deskriptif, hasil analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, pembahasan yang berisikan interpretasi dari hasil penelitian. Bab V yang merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2015, menelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian tahun 2012-2015. Tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan indeks williamson mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 30,45% dan 2015 (33,62%).
2. Dari hasil regresi, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Karena nilai probabilitas yang dihasilkan lebih dari nilai signifikansi 0,05 yaitu 0,1026 dengan nilai koefisien sebesar -0,098129.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat. dikarenakan nilai pobabilitas yang diperoleh lebih dari nilai signifikansi 0,05 yaitu 0,3206 dengan koefisien 0,049350.
4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,0000 yang berarti kurang dari nilai signifikan

5. 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,504100. Artinya tinggi rendahnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ketimpangan.
6. Industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,0364 dengan koefisien -0,036250. Dengan kata lain tinggi rendahnya industri berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan.

5.2 Implikasi

1. Secara teoritik, penelitian ini menempatkan jumlah penduduk dan industri sebagai faktor dominan terjadinya ketimpangan di Jawa Barat. Hal ini sebagaimana dilihat pada ketimpangan tertinggi yang terdapat di Kabupaten Bekasi padahal daerah tersebut memiliki industri terbanyak yaitu sebesar 816 unit. Dan dekat dengan Kabupaten Karawang yang sama-sama memiliki kawasan industri yaitu 382 unit.
2. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dalam kenyataannya dihadapkan pada upaya maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan lowongan kerja yang ditawarkan pemerintah lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan. Kondisi tersebut mengakibatkan para pekerja mau dibayar rendah bahkan hal itu dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu pendapatan masyarakat menjadi berkurang dan ketimpanganpun melebar.
3. Industri di Jawa Barat merupakan penyumbang pendapatan sebesar 43,03% pada PDRB tahun 2015. Tingginya angka industri ini dalam kenyataannya tidak cukup mendukung terhadap pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang

menyatakan bahwa industri berpengaruh positif dan signifikan. Dari sisi inilah, pemerintah daerah di Jawa Barat dianggap kurang optimal dalam mendistribusikan pendapatan pada masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneltian ini memiliki beberapa saran dibawah ini :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk dalam penelitian ini disebut sebagai faktor dominan terhadap terjadinya ketimpangan di Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah pengendalian terhadap jumlah penduduk di satu sisi dapat dilakukan melalui kebijakan keluarga berencana (KB). Pada sisi yang lain, pemerintahan Provinsi Jawa Barat sejatinya dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakatnya.
2. Sektor industri di Provinsi Jawa Barat yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan daerah, dalam kenyataannya turut pula mempengaruhi tingginya ketimpangan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan industri di Jawa Barat masih dianggap tidak merata dan bahkan mendukung terhadap ketimpangan pendapatan. kondisi inilah yang meniscayakan perhatian pada kebijakan pemerataan pendapatan ekonomi pada sektor industri dengan mengapresiasi calon-calon tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Pembatasan calon tenaga kerja yang profesional diarahkan kepada putra-putra daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ajija, Shochrul R, Dyah W. Sari, Rahmat H. Stianto, martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat
- Al-Haritsi, DR. Jaribah. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*. Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup)
- Al Zuhayli, Wahbah. 2012. *Tafsir Al Wasith*. Jakarta: Gema Insani
- Arsyad, Lincoln. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Chapra, M.Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Gema Insani
- Damanhuri, s. Didin. 2014. *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadist-hadist Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press
- Effendi, Nury. 2014. *Ekonometrika: pendekatan teori dan terapan*. Jakarta: Salemba empat
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Gujarati, Damodar N. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Gujarati, Damodar N. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Huda, Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana
- Harmadi, Sony Harry B. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Banten: Universitas Terbuka
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif: teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajat. 2015. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Nurgiyantoro, B., Gunawan & Marzuki. 2000. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Shihab, M. Quraish. 1995. *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: mizan

- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.7. Jakarta: Lentera Hati
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Predana Media
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali
- Sarwoko. 2005. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro, P. Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi: untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Arifianto, Wildan & Imam Setiono. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi pendapatan di Indonesia*
- Al Faiz, Asman. 2011. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, aglomerasi, Tingkat Pengangguran, dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen pada 25 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008*
- Hidayat, Muhammad Haris. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2012.*
- Haryoto, Edi. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014*
- Putri, Yosi Eka dkk. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.
- Pradnyadewi, Diah & Ida Bagus Putu Purbadharma. 2017. *Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali*.
- Puspitarani, Endah. 2016. *Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga kerja, dan ICOR Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupatn/kota di D.I.Y Periode 2000-2013 (dalam perspektif ekonomi syari'ah)*
- Riandoko, Benedictus dkk. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010*
- Suzana, Benu Olfie L., & Gene H. M. Kapantow. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Sulawesi Utara*.

- Utama, Putra Fajar. 2010. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota yang Tergabung Dalam Kawasan Kedung Sepur Tahun 2004-2008.*
- Zulham,Wildany. 2011. *Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten Lamongan.*
- _____. Badan Pusat Statistik, *Jawa Barat dalam angka*, 2015. Tim BPS
- _____. Badan Pusat Statistik, *Jawa Barat dalam angka*, 2016. Tim BPS
- _____. Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat, 2016*. Tim BPS



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Perhitungan Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015**

KAB/KOTA	2012					$IW = \sqrt{(Y_i - Y)^2 * f_i/n * 1/Y}$
	Y _i	Y	F _i	n		
Kab Bogor	104,287	37,753	5,073,116	44,643,586		115.43
Kab Sukabumi	31,768	37,753	2,393,191	44,643,586		7.13
Kab Cianjur	21,817	37,753	2,213,889	44,643,586		18.26
Kab Bandung	54,468	37,753	3,339,684	44,643,586		23.53
Kab Garut	27,815	37,753	2,477,114	44,643,586		12.05
Kab Tasikmalaya	17,192	37,753	1,710,426	44,643,586		20.71

Kab Ciamis	15,214	37,753	1,148,782	44,643,586		18.61
Kab Kuningan	10,963	37,753	1,036,494	44,643,586		21.01
Kab Cirebon	23,858	37,753	2,076,615	44,643,586		15.42
Kab Majalengka	14,307	37,753	1,164,724	44,643,586		19.49
Kab Sumedang	16,401	37,753	1,117,919	44,643,586		17.39
Kab Indramayu	51,389	37,753	1,663,397	44,643,586		13.55
Kab Subang	20,589	37,753	1,480,708	44,643,586		16.09
Kab Purwakarta	31,934	37,753	885,386	44,643,586		4.22
Kab Karawang	111,424	37,753	2,199,394	44,643,586		84.16
Kab Bekasi	175,280	37,753	2,884,300	44,643,586		179.91
Kab Bandung Barat	21,652	37,753	383,915	44,643,586		7.68
Kab Pangandaran	5,463	37,753	1,567,398	44,643,586		31.14

Kota Bogor	21,204	37,753	995,081	44,643,586		12.72
Kota Sukabumi	5,978	37,753	308,405	44,643,586		13.59
Kota Bandung	119,632	37,753	2,444,617	44,643,586		98.61
Kota Cirebon	11,309	37,753	298,825	44,643,586		11.13
Kota Bekasi	46,907	37,753	2,498,598	44,643,586		11.15
Kota Depok	30,703	37,753	1,891,981	44,643,586		7.47
Kota Cimahi	15,212	37,753	562,721	44,643,586		13.02
Kota Tasikmalaya	10,325	37,753	648,178	44,643,586		17.01
Kota Banjar	2,251	37,753	178,728	44,643,586		11.56
2013						
Kab Bogor	110,707	40,079	5,202,097	45,341,799		119.50
Kab Sukabumi	33,420	40,079	2,408,417	45,341,799		7.67

Kab Cianjur	22,805	40,079	2,225,313	45,341,799		19.12
Kab Bandung	57,676	40,079	3,405,475	45,341,799		24.09
Kab Garut	29,138	40,079	2,502,410	45,341,799		12.84
Kab Tasikmalaya	17,941	40,079	1,720,123	45,341,799		21.54
Kab Ciamis	16,014	40,079	1,155,471	45,341,799		19.19
Kab Kuningan	11,634	40,079	1,042,789	45,341,799		21.55
Kab Cirebon	25,042	40,079	2,093,075	45,341,799		16.14
Kab Majalengka	15,013	40,079	1,170,505	45,341,799		20.12
Kab Sumedang	17,195	40,079	1,125,125	45,341,799		18.01
Kab Indramayu	52,866	40,079	1,672,683	45,341,799		12.27
Kab Subang	21,422	40,079	1,496,886	45,341,799		16.93
Kab Purwakarta	34,186	40,079	898,001	45,341,799		4.14

Kab Karawang	119,484	40,079	2,225,383	45,341,799		87.87
Kab Bekasi	186,480	40,079	3,002,112	45,341,799		188.17
Kab Bandung Barat	22,937	40,079	386,129	45,341,799		7.90
Kab Pengandaran	5,735	40,079	1,588,781	45,341,799		32.11
Kota Bogor	22,475	40,079	1,013,019	45,341,799		13.14
Kota Sukabumi	6,302	40,079	311,822	45,341,799		13.99
Kota Bandung	128,989	40,079	2,458,503	45,341,799		103.41
Kota Cirebon	11,864	40,079	301,728	45,341,799		11.50
Kota Bekasi	49,740	40,079	2,570,397	45,341,799		11.49
Kota Depok	32,711	40,079	1,962,182	45,341,799		7.66
Kota Cimahi	16,026	40,079	571,991	45,341,799		13.49
Kota Tasikmalaya	10,962	40,079	651,676	45,341,799		17.44

Kota Banjar	2,374	40,079	179,706	45,341,799	11.86
2014					
Kab Bogor	117,336	42,419	5,331,149	46,029,668	123.79
Kab Sukabumi	35,521	42,419	2,422,113	46,029,668	7.68
Kab Cianjur	24,042	42,419	2,235,418	46,029,668	19.66
Kab Bandung	61,099	42,419	3,470,393	46,029,668	24.90
Kab Garut	30,541	42,419	2,526,186	46,029,668	13.51
Kab Tasikmalaya	18,852	42,419	1,728,587	46,029,668	22.17
Kab Ciamis	16,389	42,419	1,162,102	46,029,668	20.08
Kab Kuningan	12,385	42,419	1,049,084	46,029,668	22.01
Kab Cirebon	26,312	42,419	2,109,588	46,029,668	16.74
Kab Majalengka	15,750	42,419	1,176,313	46,029,668	20.70
Kab Sumedang	18,003	42,419	1,131,516	46,029,668	18.59

Kab Indramayu	55,464	42,419	1,682,022	46,029,668		12.11
Kab Subang	22,506	42,419	1,513,093	46,029,668		17.53
Kab Purwakarta	36,173	42,419	910,007	46,029,668		4.26
Kab Karawang	126,749	42,419	2,250,120	46,029,668		90.53
Kab Bekasi	197,159	42,419	3,122,698	46,029,668		195.69
Kab Bandung Barat	24,261	42,419	388,320	46,029,668		8.10
Kab Pengandaran	5,974	42,419	1,609,512	46,029,668		33.09
Kota Bogor	23,835	42,419	1,030,720	46,029,668		13.50
Kota Sukabumi	6,644	42,419	315,001	46,029,668		14.37
Kota Bandung	138,958	42,419	2,470,802	46,029,668		108.60
Kota Cirebon	12,541	42,419	304,584	46,029,668		11.80
Kota Bekasi	52,534	42,419	2,642,508	46,029,668		11.77

Kota Depok	35,193	42,419	2,033,508	46,029,668		7.37
Kota Cimahi	16,955	42,419	579,015	46,029,668		13.87
Kota Tasikmalaya	11,637	42,419	654,794	46,029,668		17.83
Kota Banjar	2,492	42,419	180,515	46,029,668		12.14
2015						
Kab Bogor	124,480	44,698	5,459,668	47,379,389		128.10
Kab Sukabumi	37,264	44,698	2,434,221	47,379,389		7.97
Kab Cianjur	25,355	44,698	2,243,904	47,379,389		19.91
Kab Bandung	64,697	44,698	3,534,114	47,379,389		25.84
Kab Garut	31,918	44,698	2,548,723	47,379,389		14.02
Kab Tasikmalaya	19,664	44,698	1,735,998	47,379,389		22.67
Kab Ciamis	17,780	44,698	1,168,682	47,379,389		20.00
Kab Kuningan						22.25

	13,175	44,698	1,055,417	47,379,389	
Kab Cirebon	27,594	44,698	2,126,179	47,379,389	17.14
Kab Majalengka	16,590	44,698	1,182,109	47,379,389	21.00
Kab Sumedang	18,945	44,698	1,137,273	47,379,389	18.87
Kab Indramayu	56,663	44,698	1,691,386	47,379,389	10.69
Kab Subang	23,696	44,698	1,529,388	47,379,389	17.85
Kab Purwakarta	37,892	44,698	921,598	47,379,389	4.49
Kab Karawang	132,446	44,698	2,273,579	47,379,389	90.92
Kab Bekasi	205,956	44,698	3,246,013	47,379,389	199.65
Kab Bandung Barat	25,477	44,698	1,629,423	47,379,389	16.86
Kab Pengandaran	6,271	44,698	390,483	47,379,389	16.50
Kota Bogor	25,296	44,698	1,047,922	47,379,389	13.65

Kota Sukabumi	6,983	44,698	318,117	47,379,389		14.62
Kota Bandung	149,567	44,698	2,481,469	47,379,389		113.52
Kota Cirebon	13,268	44,698	307,494	47,379,389		11.98
Kota Bekasi	55,463	44,698	2,714,825	47,379,389		12.19
Kota Depok	37,525	44,698	2,106,102	47,379,389		7.15
Kota Cimahi	17,876	44,698	586,580	47,379,389		14.12
Kota Tasikmalaya	12,370	44,698	657,477	47,379,389		18.01
Kota Banjar	2,624	44,698	181,425	47,379,389		12.31

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Regresi Data Panel

Kabupaten_Kota	Tahun	IW	PE	IPM	JP	INDS
Kab_Bogor	2012	4.74866	1.79342	4.18449	15.43947	6.44413
Kab_Bogor	2013	4.78332	1.81482	4.20080	15.46457	6.54679
Kab_Bogor	2014	4.81859	1.79342	4.21005	15.48908	6.57088
Kab_Bogor	2015	4.85281	1.80665	4.21612	15.51290	4.61512
Kab_Sukabumi	2012	1.96431	1.85317	4.13148	14.68814	5.50939
Kab_Sukabumi	2013	2.03732	1.70475	4.15309	14.69448	5.53733
Kab_Sukabumi	2014	2.03862	1.78842	4.15998	14.70015	5.52943
Kab_Sukabumi	2015	2.07568	1.59127	4.16573	14.70514	2.94444
Kab_Cianjur	2012	2.90471	1.72277	4.09900	14.61026	4.55388
Kab_Cianjur	2013	2.95073	1.58719	4.12196	14.61541	4.56435
Kab_Cianjur	2014	2.97859	1.62137	4.12842	14.61994	4.55388
Kab_Cianjur	2015	2.99122	1.69745	4.13389	14.62373	1.94591
Kab_Bandung	2012	3.15828	1.83737	4.22142	15.02139	6.78333
Kab_Bandung	2013	3.18180	1.77834	4.22800	15.04089	6.91968
Kab_Bandung	2014	3.21487	1.77665	4.23498	15.05978	6.96319
Kab_Bandung	2015	3.25192	1.77326	4.24921	15.07797	4.06044
Kab_Garut	2012	2.48906	1.40364	4.11153	14.72260	5.17615
Kab_Garut	2013	2.55257	1.56025	4.12180	14.73276	5.21494
Kab_Garut	2014	2.60343	1.57070	4.13084	14.74222	5.23111
kab_Garut	2015	2.64048	1.50630	4.14646	14.75110	0.00000
Kab_Tasikmalaya	2012	3.03062	1.39128	4.12212	14.35225	3.55535
Kab_Tasikmalaya	2013	3.06991	1.53687	4.13357	14.35791	3.97029
Kab_Tasikmalaya	2014	3.09874	1.56444	4.13980	14.36281	3.97029
Kab_Tasikmalaya	2015	3.12104	1.46094	4.14583	14.36709	0.69315
Kab_Ciamis	2012	2.92370	0.00000	4.19404	13.95421	4.46591
Kab_Ciamis	2013	2.95439	1.67523	4.20767	13.96002	4.43082
Kab_Ciamis	2014	2.99972	0.81536	4.21420	13.96574	4.43082
Kab_Ciamis	2015	2.99972	2.13771	4.21980	13.97139	1.09861
Kab_Kuningan	2012	3.04500	1.74222	4.18358	13.85135	3.25810
Kab_Kuningan	2013	3.07038	1.83258	4.19208	13.85741	3.58352
Kab_Kuningan	2014	3.09150	1.84372	4.19915	13.86343	3.58352
Kab_Kuningan	2015	2.99573	1.85317	4.20752	13.86945	1.38629
Kab_Cirebon	2012	2.73567	1.69745	4.16636	14.54625	6.04737
Kab_Cirebon	2013	2.78130	1.60141	4.17531	14.55414	5.77144
Kab_Cirebon	2014	2.81780	1.62334	4.18251	14.56200	5.77765

Kabupaten_Kota	Tahun	IW	PE	IPM	JP	INDS
Kab_Cirebon	2015	3.10234	1.58309	4.19071	14.56984	4.06044
Kab_Majalengka	2012	2.96990	1.80171	4.14520	13.96799	6.00881
Kab_Majalengka	2013	3.00171	1.59534	4.15434	13.97295	6.02345
Kab_Majalengka	2014	3.03013	1.59127	4.15998	13.97790	6.02587
Kab_Majalengka	2015	2.84141	1.67335	4.17053	13.98281	3.29584
Kab_Sumedang	2012	2.85590	1.88099	4.21005	13.92698	4.38203
Kab_Sumedang	2013	2.89093	1.57691	4.22640	13.93340	4.34381
Kab_Sumedang	2014	2.92262	1.54756	4.23062	13.93907	4.35671
Kab_Sumedang	2015	3.04452	1.65441	4.23830	13.94414	0.69315
kab_Indramayu	2012	2.60639	1.15688	4.12858	14.32437	4.56435
kab_Indramayu	2013	2.50716	1.05082	4.14282	14.32994	4.39445
kab_Indramayu	2014	2.49403	1.59534	4.15183	14.33551	4.38203
kab_Indramayu	2015	2.93757	0.77011	4.16449	14.34106	0.00000
Kab_Subang	2012	2.77820	0.51083	4.17223	14.20803	3.36730
Kab_Subang	2013	2.82909	1.40854	4.18174	14.21890	3.29584
Kab_Subang	2014	2.86391	1.61343	4.18662	14.22967	3.46574
Kab_Subang	2015	2.36931	1.66582	4.19750	14.24038	1.94591
Kab_Purwakarta	2012	1.43984	1.92132	4.19419	13.69378	5.08140
Kab_Purwakarta	2013	1.42070	1.96711	4.20604	13.70793	5.08140
Kab_Purwakarta	2014	1.44927	1.74397	4.20946	13.72121	5.13580
Kab_Purwakarta	2015	2.88200	1.55814	4.21715	13.73386	3.73767
Kab_Karawang	2012	4.43272	1.59737	4.18920	14.60369	5.86930
Kab_Karawang	2013	4.47586	2.07443	4.19885	14.61544	6.27099
Kab_Karawang	2014	4.50568	1.68083	4.20589	14.62649	6.29527
Kab_Karawang	2015	4.50998	1.50185	4.21450	14.63687	4.64439
Kab_Bekasi	2012	5.19246	1.87641	4.23960	14.87479	6.70808
Kab_Bekasi	2013	5.23735	1.82938	4.24978	14.91483	7.01571
Kab_Bekasi	2014	5.27653	1.77156	4.25575	14.95421	7.04141
Kab_Bekasi	2015	5.29657	1.49515	4.26535	14.99294	5.23111
Kab_Bandung Barat	2012	2.03862	1.79840	4.14583	12.85818	5.14749
Kab_Bandung Barat	2013	2.06686	1.78171	4.15779	12.86393	5.13580
Kab_Bandung Barat	2014	2.09186	1.75267	4.16309	12.86959	5.18739
Kab_Bandung Barat	2015	2.82494	1.61144	4.17792	14.30374	4.34381
Kab_Pengandaran	2012	3.43849	0.00000	0.00000	14.26493	0.00000
Kab_Pengandaran	2013	3.46917	1.59939	4.17022	14.27848	0.00000
Kab_Pengandaran	2014	3.49923	1.43270	4.17884	14.29144	0.00000
Kab_Pengandaran	2015	2.80336	1.60543	4.18388	12.87514	0.00000
Kota_Bogor	2012	2.54318	1.84372	4.28013	13.81058	4.55388
Kota_Bogor	2013	2.57566	1.79840	4.28854	13.82845	4.53260
Kota_Bogor	2014	2.60269	1.79342	4.29183	13.84577	4.53260

Kabupaten_Kota	Tahun	IW	PE	IPM	JP	INDS
Kota_Bogor	2015	2.61374	1.81319	4.29932	13.86232	5.16479
Kota_Sukabumi	2012	2.60933	1.75613	4.24477	12.63917	2.99573
Kota_Sukabumi	2013	2.63834	1.68825	4.26000	12.65019	2.99573
Kota_Sukabumi	2014	2.66514	1.69194	4.26535	12.66033	2.99573
Kota_Sukabumi	2015	2.68239	1.62924	4.27444	12.67017	2.56495
Kota_Bandung	2012	4.59117	2.14359	4.36055	14.70940	6.48158
Kota_Bandung	2013	4.63870	2.05924	4.36374	14.71506	6.16542
Kota_Bandung	2014	4.68767	2.04252	4.36919	14.72005	6.19032
kota_Bandung	2015	4.73198	2.03209	4.37789	14.72436	2.39790
Kota_Cirebon	2012	2.40964	1.77834	4.27625	12.60761	3.89182
Kota_Cirebon	2013	2.44235	1.59127	4.28041	12.61728	3.87120
Kota_Cirebon	2014	2.46810	1.74222	4.28950	12.62670	3.87120
Kota_Cirebon	2015	2.48324	1.75786	4.29511	12.63621	3.71357
Kota_Bekasi	2012	2.41144	1.90806	4.35298	14.73124	5.22036
Kota_Bekasi	2013	2.44148	1.79840	4.36475	14.75957	5.25227
Kota_Bekasi	2014	2.46555	1.72455	4.36742	14.78724	5.28827
Kota_Bekasi	2015	2.50062	1.71740	4.37739	14.81424	2.83321
Kota_Depok	2012	2.01089	2.08691	4.34744	14.45313	4.57471
Kota_Depok	2013	2.03601	1.92425	4.36016	14.48957	4.55388
Kota_Depok	2014	1.99742	1.98513	4.36412	14.52527	4.62497
Kota_Depok	2015	1.96711	1.89160	4.37084	14.56035	4.23411
Kota_Cimahi	2012	2.56649	1.83098	4.31735	13.24054	4.93447
Kota_Cimahi	2013	2.60195	1.73342	4.32876	13.25688	4.93447
Kota_Cimahi	2014	2.62973	1.70293	4.33152	13.26908	5.06890
Kota_Cimahi	2015	2.64759	1.69194	4.33624	13.28206	2.83321
Kota_Tasikmalaya	2012	2.83380	1.75958	4.21715	13.38192	4.23411
Kota_Tasikmalaya	2013	2.85877	1.81970	4.22873	13.38730	4.17439
Kota_Tasikmalaya	2014	2.88088	1.81808	4.23469	13.39208	4.15888
Kota_asikmalaya	2015	2.89093	1.83896	4.24835	13.39617	2.94444
Kota_Banjar	2012	2.44755	1.67335	4.21257	12.09362	3.21888
Kota_Banjar	2013	2.47317	1.69378	4.21965	12.09908	3.04452
Kota_Banjar	2014	2.49651	1.60342	4.22450	12.10357	3.04452
Kota_Banjar	2015	2.51041	1.67147	4.23859	12.10860	3.46574

LAMPIRAN 3

STATISTIK DESKRIPTIF DATA PANEL

	IW	PE	IPM	JP	INDS
Mean	32.08741	5.238981	67.72463	1691895.	187.3611
Median	17.07500	5.535000	67.34000	1599147.	85.50000
Maximum	199.6500	8.530000	79.67000	5459668.	1143.000
Minimum	4.140000	-22.48000	0.000000	178728.0	0.000000
Std. Dev.	42.80330	2.990527	8.277471	1123960.	258.4765
Skewness	2.493422	-7.517869	-4.885001	1.097018	2.128593
Kurtosis	8.470480	69.86044	42.70882	4.710308	7.017351
Jarque-Bera	246.5764	21133.76	7525.093	34.82527	154.1823
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	3465.440	565.8100	7314.260	1.83E+08	20235.00
Sum Sq. Dev.	196037.1	956.9282	7331.268	1.35E+14	7148679.
Observations	108	108	108	108	108

LAMPIRAN 4

UJI SPESIFIKASI MODEL

A. Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	75.605479	(31,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	379.415575	31	0.0000

B. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.209588	4	0.5234



C. Uji Lagrange Multiplier (LM)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Obs	Kab Bogor	Kab Sukabumi	Kab Cianjur	Kab Bandung	Kab Garut	Kab Tasikmalaya	Kab Ciamis	Kab Kuningan	Kab Cirebon	Kab Majalengka	Kab Sumedang
2012	0.9979	-1.4017	-0.3668	-0.4132	-0.8285	-0.0293	0.1721	0.2039	-0.5683	-0.0758	-0.0889
2013	1.0156	-1.3133	-0.3052	-0.3981	-0.7879	-0.0282	0.0146	0.2011	-0.5004	-0.0224	-0.0183
2014	1.0419	-1.3227	-0.2819	-0.3748	-0.7422	-0.0039	0.1553	0.2192	-0.4693	0.0048	0.0140
2015	1.1622	-1.1354	-0.1482	-0.1986	-0.4379	0.1930	0.1709	0.2307	-0.0968	-0.0573	0.3060
sigma eit	4.2176	-5.1731	-1.1021	-1.3847	-2.7964	0.1316	0.5129	0.8549	-1.6347	-0.1507	0.2129
sigma(eit)^2	17.7878	26.7605	1.2146	1.9173	7.8200	0.0173	0.2631	0.7308	2.6723	0.0227	0.0453
2012	0.9958	1.9648	0.1346	0.1707	0.6864	0.0009	0.0296	0.0416	0.3229	0.0057	0.0079
2013	1.0314	1.7246	0.0931	0.1585	0.6208	0.0008	0.0002	0.0404	0.2504	0.0005	0.0003
2014	1.0855	1.7495	0.0795	0.1405	0.5508	0.0000	0.0241	0.0480	0.2203	0.0000	0.0002
2015	1.3508	1.2892	0.0220	0.0394	0.1917	0.0373	0.0292	0.0532	0.0094	0.0033	0.0936
sigma(eit^2)	4.4634	6.7281	0.3291	0.5091	2.0497	0.0389	0.0832	0.1833	0.8029	0.0096	0.1021

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
kab Indramayu	Kab Subang	Kab Purwaka rta	Kab Karawang	Kab Bekasi	Kab Bandung Barat	kab Pangan daran	Kota Bogor	Kota Sukabu mi	Kota Bandung	Kota Cirebon	Kota Bekasi
-0.4636	0.0173	-1.4375	1.1253	-0.9351	-0.4433	0.1705	-0.3415	0.3567	1.1662	0.1288	-0.9351
-0.5429	-0.1488	-1.4667	1.0903	-0.9059	-0.4136	0.6052	-0.3100	0.3903	1.2369	0.1798	-0.9059
-0.6182	-0.1500	-1.4214	1.1592	-0.8879	-0.3898	0.6493	-0.2901	0.4127	1.2849	0.1853	-0.8879
0.1371	-0.5779	0.0975	1.2628	-0.7403	-0.2686	0.5985	-0.3196	0.4553	1.5195	0.2029	-0.7403
-1.4876	-0.8594	-4.2281	4.6377	-3.4692	-1.5152	2.0235	-1.2612	1.6150	5.2074	0.6969	-3.4692
2.2128	0.7385	17.8769	21.5079	12.0353	2.2959	4.0943	1.5907	2.6082	27.1174	0.4856	12.0353
0.2149	0.0003	2.0663	1.2664	0.8744	0.1965	0.0291	0.1166	0.1272	1.3600	0.0166	0.8744
0.2947	0.0221	2.1513	1.1888	0.8207	0.1710	0.3663	0.0961	0.1524	1.5298	0.0323	0.8207
0.3822	0.0225	2.0204	1.3438	0.7883	0.1519	0.4215	0.0841	0.1703	1.6510	0.0344	0.7883
0.0188	0.3339	0.0095	1.5946	0.5481	0.0722	0.3582	0.1022	0.2073	2.3089	0.0412	0.5481
0.9106	0.3788	6.2475	5.3936	3.0315	0.5916	1.1751	0.3990	0.6572	6.8497	0.1244	3.0315

24	25	26	27
Kota Depok	Kota Cimahi	Kota Tasikmalaya	Kota Banjar
-1.1940	-0.06333	0.16664	0.44421
-1.1647	-0.02290	0.18693	0.47470
-1.2299	-0.00373	0.20861	0.50682
-1.2456	0.12191	0.27713	0.49159
-4.8341	0.03195	0.83931	1.91732
23.3685	0.0010	0.7044	3.6761
Jumlah Total	191.601		
1.4255	0.00401	0.02777	0.19732
1.3565	0.00052	0.03494	0.22534
1.5127	0.00001	0.04352	0.25687
1.5514	0.01486	0.07680	0.24166
5.8461	0.01941	0.18303	0.92119
Jumlah Total	51.0596		

n	27
T	4
LM Test	18
	7.5762
	136.3720
df	4
C-Square Tabel	9.49

Keterangan:

n (jumlah sampel) = 27 kabupaten/kota

T (jumlah periode waktu) = 4

$(e_{it})^2$ = 191.601

(e_{it}^2) = 51.0596

= 5%

df = 4

Chi – Squares = 9.49

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^T [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{27 \times 4}{2(4-1)} \left[\frac{191.601}{51.0596} - 1 \right]$$

$$LM = 18 \times 7.5762$$

$$LM = 136.3720$$

LM > C-Square maka H0 diterima yaitu *Random Effect* model yang digunakan.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

LAMPIRAN 5**HASIL REGRESI DATA PANEL****A. Common Effect Model**

Dependent Variable: IW				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/09/17 Time: 10:01				
Sample: 2012 2015				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 32				
Total panel (unbalanced) observations: 108				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.112944	0.226454	0.498751	0.6190
JP	0.468746	0.098165	4.775107	0.0000
IPM	-0.141730	0.206451	-0.686510	0.4939
INDS	0.050077	0.049155	1.018745	0.3107
C	-3.418636	1.602972	-2.132686	0.0353
R-squared	0.239157	Mean dependent var		2.985374
Adjusted R-squared	0.209610	S.D. dependent var		0.860546
S.E. of regression	0.765059	Akaike info criterion		2.347463
Sum squared resid	60.28746	Schwarz criterion		2.471635
Log likelihood	-121.7630	Hannan-Quinn criter.		2.397810
F-statistic	8.094031	Durbin-Watson stat		0.472036
Prob(F-statistic)	0.000010			

B. Fixed Effect Model

Dependent Variable: IW				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/09/17 Time: 10:12				
Sample: 2012 2015				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 32				
Total panel (unbalanced) observations: 108				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.107348	0.059870	-1.793028	0.0772
IPM	0.050335	0.049686	1.013071	0.3144
JP	0.490633	0.093179	5.265486	0.0000
INDS	-0.040363	0.017476	-2.309572	0.0238
C	-3.783634	1.375359	-2.751015	0.0075
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.977324	Mean dependent var	2.985374	
Adjusted R-squared	0.966301	S.D. dependent var	0.860546	
S.E. of regression	0.157974	Akaike info criterion	0.591571	-
Sum squared resid	1.796817	Schwarz criterion	0.302473	-
Log likelihood	67.94481	Hannan-Quinn criter.	0.229068	
F-statistic	88.66063	Durbin-Watson stat	2.302552	
Prob(F-statistic)	0.000000			

C. Random Effect Model

Dependent Variable: IW				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 05/09/17 Time: 10:11				
Sample: 2012 2015				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 32				
Total panel (unbalanced) observations: 108				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.098129	0.059586	-1.646834	0.1026
IPM	0.049350	0.049443	0.998128	0.3206
JP	0.504100	0.082667	6.097969	0.0000
INDS	-0.036250	0.017100	-2.119890	0.0364
C	-3.977138	1.227775	-3.239307	0.0016
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.778711	0.9605
Idiosyncratic random			0.157974	0.0395
Weighted Statistics				
R-squared	0.321793	Mean dependent var	0.322292	
Adjusted R-squared	0.295455	S.D. dependent var	0.199701	
S.E. of regression	0.156696	Sum squared resid	2.529033	
F-statistic	12.21776	Durbin-Watson stat	1.753420	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.201732	Mean dependent var	2.985374	
Sum squared resid	63.25289	Durbin-Watson stat	0.451522	

Lampiran 6

A. Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2010 tahun 2012-2015

Kab/kota	2012	2013	2014	2015	rata-rata
Kab Bogor	104,287	110,685	117,336	124,480	114,197
Kab Sukabumi	31,768	33,517	35,521	37,264	34,517
Kab Cianjur	21,817	22,883	24,042	25,355	23,524
Kab Bandung	54,468	57,691	61,099	64,697	59,489
Kab Garut	27,815	29,138	30,541	31,918	29,853
Kab Tasikmalaya	17,192	17,991	18,852	19,664	18,425
Kab Ciamis	15,214	16,027	16,389	17,780	16,352
Kab Kuningan	10,963	11,649	12,385	13,175	12,043
Kab Cirebon	23,858	25,042	26,312	27,594	25,702
Kab Majalengka	14,307	15,013	15,750	16,590	15,415
Kab Sumedang	16,401	17,195	18,003	18,945	17,636
Kab Indramayu	51,389	52,859	55,464	56,663	54,094
Kab Subang	20,589	21,431	22,506	23,696	22,056
Kab Purwakarta	31,934	34,216	36,173	37,892	35,054
Kab Karawang	111,424	120,295	126,749	132,446	122,728
Kab Bekasi	175,280	186,207	197,159	205,956	191,150
Kab Bandung Barat	21,652	22,937	24,261	25,477	23,582
Kab Pangandaran	5,463	5,733	5,974	6,271	5,860
Kota Bogor	21,204	22,485	23,835	25,296	23,205
Kota Sukabumi	5,978	6,302	6,644	6,983	6,476

Kab/kota	2012	2013	2014	2015	rata-rata
Kota Bandung	119,632	129,005	138,958	149,567	134,291
Kota Cirebon	11,309	11,864	12,541	13,268	12,246
Kota Bekasi	46,907	49,741	52,534	55,463	51,161
Kota Depok	30,703	32,806	35,193	37,525	34,057
Kota Cimahi	15,212	16,072	16,955	17,876	16,529
Kota Tasikmalaya	10,325	10,962	11,637	12,370	11,323
Kota Banjar	2,251	2,374	2,492	2,624	2,435
Provinsi Jawa Barat	37,753	40,079	42,419	44,698	41,237



CURRICULUM VITAE



A. BIOGRAFI

Nama : Holifah
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 4 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Wonokromo Tinatah RT 10/03 Alian, Kebumen
JATENG
Nomor Hp : 08990275354
Email : Holifahuin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1999-2005 : Pendidikan SD Negeri 03 Wonokromo
2005-2008 : Pendidikan SMP Negeri 1 Alian
2009-2012 : Pendidikan MA Negeri 1 Kebumen
2012-2013 : Pendidikan STIE BI AKA Jakarta Selatan
2013-sekarang : Pendidikan Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta